

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, belum pernah ada pembahasan mengenai penetapan Ibukota Negara maupun Ibukota Provinsi. Kota-kota utama yang kini menjadi Ibukota Negara dan juga sebagai Ibukota Provinsi (Jakarta) dan juga penetapan Ibukota Provinsi di Indonesia atau sebagian besar Provinsi di Indonesia merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Berbeda sekali dengan masa kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara, sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia hampir semua wilayah di Indonesia memiliki dan membangun Ibukotanya sendiri. Sebagai contoh pada masa kerajaan Majapahit terdapat reruntuhan reruntuhan bangunan yang dianggap sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian pada zaman Kerajaan Mataram, Yogyakarta dipilih sebagai pusat pemerintahannya. Selama masa Kerajaan berlangsung di Indonesia, pusat pemerintahan sering berpindah-pindah dengan berbagai macam alasan pendukungnya. Salah satu alasannya adalah ketika suatu bencana terjadi di suatu kerajaan, pada zaman itu dianggap bahwa Kerajaan tersebut dikutuk oleh Tuhan dan pusat kerajaan harus direlokasi. Begitupun juga dengan raja, raja pun akan berganti tergantung dengan kondisi di Pemerintahan Pusat.

Sebagai bagian dari penetapan ibu kota Indonesia, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan dan bisnis, menjadikannya tempat yang menarik bagi penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia untuk tinggal dan mencari pekerjaan. Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946 hingga Desember 1949. Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta didasari karena Jakarta saat itu sudah dikuasai oleh Militer Belanda yang akan menghambat urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Ibukota Negara dipindahkan ke Yogyakarta agar dalam menjalani urusan politik dan pemerintahan menjadi lebih lancar dengan pemindahan Ibukota Negara ke Yogyakarta. Ibu kota kemudian dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukittinggi di Sumatera Barat untuk sementara waktu. Pemindahan Ibukota Negara pada saat itu juga kondisi di Yogyakarta sudah genting dan Presiden Soekarno berinisiatif membentuk pemerintahan darurat sebelum Yogyakarta diduduki oleh militer Belanda pada Desember 1948 hingga Juni 1949.

Dalam permasalahan perpindahan Ibukota Negara Indonesia sudah dimulai dari masa Presiden Soekarno, pada waktu itu Presiden Soekarno sudah menetapkan bahwa jika Ibukota Negara Indonesia yang baru akan dipindahkan ke Kalimantan Tengah yaitu tepatnya di Kota Palangkaraya. Namun, baru terealisasikan Perpindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur pada masa Presiden Joko Widodo.

Terkait Jakarta sebagai ibu kota saat ini, pemilihan Jakarta sebagai Ibukota Negara tidak lepas dari konteks konstitusional selama ini. Dalam sejarahnya, nama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pertama kali disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota (Perpres) Jakarta Nomor 2 Tahun 1961, yang kemudian menjadi Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 2 Tahun 1961. Dengan diberlakukannya undang-undang PNPS, Presiden Sukarno mencanangkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota harus menjadi kota pencerahan, kota teladan, dan kota impian seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Jakarta sebagai ibu kota provinsi harus memenuhi syarat minimal untuk menjadi ibu kota provinsi dan harus dilakukan secara cepat dan maksimal sesuai rencana.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Penetapan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi landasan hukum kedua bagi Ibu Kota Negara dan akan terus dikenal sebagai Jakarta, ibu kota Negara Republik Indonesia. Kedudukan Jakarta sebagai Daerah Ibu Kota Negara yang berlaku sejak tanggal 22 Juni 1964 hanya ditegaskan dalam dua bagian undang-undang ini. Hal ini menandakan dikenal dengan nama Jakarta sejak Presiden Sukarno mendeklarasikan Daerah Khusus Ibukota Jabodetabek akan tetap dijadikan sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia.

Dengan menyetujui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Presiden Soeharto membatalkan kedua undang-undang tersebut pada tahun 1990. Menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta mempunyai peranan penting dalam mengembangkan sistem nasional kenegaraan serta menunjang dan memajukan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu, Jakarta, ibu kota negara, berfungsi sebagai pusat kesejahteraan masyarakat dan representasi budaya Indonesia.

Kemudian pada masa reformasi tahun 1998, Presiden Habibie kembali mengubah dasar hukum DKI Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang menekankan keunikan Jakarta. sebagai Ibu Kota Negara. Begitu pula pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat dan dilaksanakan untuk memperkuat kedudukan Jakarta sebagai Negara. Modal.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas, hak, tugas dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 (Pasal 5) menyatakan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya mempunyai hak dan wewenang khusus, tetapi juga tugas dan tanggung jawab. Karena kekhususannya, Pemprov DKI mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia (Pasal 26 Ayat 7). Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta akan melimpahkan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia yang meliputi: A. Penataan ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. B. Pengendalian Penduduk dan Permukiman. C. Transportasi. D. Perindustrian dan perdagangan; dan E. wisatawan. Dalam melaksanakan fungsi kedinasan dan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini sejalan dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dengan merelokasi pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa, dan lebih khusus lagi ke Kalimantan. Ibu kota negara yang baru direncanakan dan dibangun dengan standar baru: lebih berkualitas, lebih adaptif, lebih inovatif, berkeadilan untuk segala gender, inklusif, adil, berkelanjutan dan bermartabat. Pemindahan Ibukota ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain pemerataan pembangunan fisik, ekonomi, kondisi sosial dan mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian nasional.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perubahannya tidak diatur secara tegas, maka pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia sepenuhnya dimungkinkan. Ayat (2) Bab 2 UUD Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut: Majelis Permusyawaratan Rakyat diadakan di Ibukota Negara sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun. Tidak ada ketentuan dalam konstitusi yang menentukan di mana dan

bagaimana Ibukota Negara diatur. Artinya, ada banyak fleksibilitas dalam perencanaan, termasuk relokasi Ibukota Negara. Tentu saja perlu ada alasan yang kuat dan mendasar dalam melakukan pemindahan ibu kota negara agar dapat memanfaatkan kemampuannya.

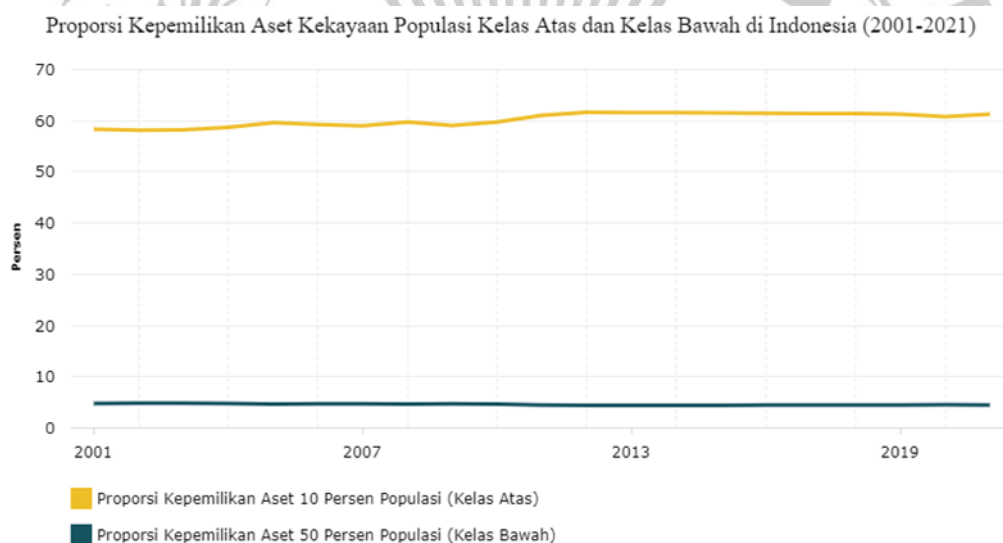
Pemerintah berencana mengurangi dampak ketimpangan ekonomi akibat tingginya kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa. Saat ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memindahkan ibu kota negara ke salah satu dari dua kabupaten di luar Jawa—Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi tersebut dipandang sangat penting di antara kota-kota berkembang, khususnya Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, karena mengurangi risiko bencana alam. Mengingat Kalimantan Timur terletak di tengah-tengah Indonesia, maka rencana pemindahan ibu kota diharapkan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia dan mendorong pembangunan sejumlah sektor baik lokal maupun nasional.

Dampak pemekaran yang akan terjadi pada lokasi ibukota negara yang baru, khususnya dengan memilih Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara, dapat diamati dari asumsi bahwa pemilihan ini akan memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional. Hingga saat ini, Jakarta masih menjadi pusat yang sangat dominan dalam peredaran ekonomi Indonesia. Beberapa pihak meyakini bahwa perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur dapat mengurangi beban dan tanggung jawab yang saat ini ditanggung oleh Jakarta, dan memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur dapat berpotensi memberikan dampak positif pada sektor-sektor lainnya.

Perpindahan ibukota negara juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Karena proyek pemindahan Ibukota Negara dilaksanakan secara bertahap, dampak awal kebijakan ini mungkin tidak begitu terlihat, dan hasilnya akan terlihat ketika rencana ini mengalami kendala atau tidak berjalan sesuai rencana. Dalam hal dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini sangat tergantung pada tahapan perencanaan. Jika perencanaan dilakukan dengan matang, dampak pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat terwujud dalam waktu 5 tahun, bahkan mungkin lebih besar dari rencana awal. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemindahan ibukota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2% karena adanya dorongan investasi baru. Jika kebijakan ini berhasil dijalankan dengan baik, peningkatan ekonomi Indonesia dapat jauh lebih besar dari perkiraan awal yang sudah disusun oleh Pemerintah.

Pemerintah menjelaskan alasan utama di balik pemindahan Ibukota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dengan fokus pada upaya pemerataan ekonomi dan kondisi sosial. Konsentrasi operasional pemerintah dan korporasi di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta, diyakini menjadi penghambat berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru yang berlokasi di luar Pulau Jawa. Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur diperkirakan akan membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menyatakan bahwa kesenjangan antar daerah secara umum menjadi penghambat ekspansi perekonomian nasional. Pemerintah mempunyai cita-cita luhur untuk mencapai proses pemerataan ekonomi sekaligus mempersempit kesenjangan yang ada antara Pulau Jawa dengan daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa.

Gambar 1.1



katadata.co.id

databoks

Berdasarkan Laporan Ketimpangan Dunia 2022, tidak terjadi perubahan substansial pada tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir. Berdasarkan penelitian, di antara penduduk Indonesia selama periode 2001-2021, lima puluh persen penduduknya memiliki kurang dari lima persen total kekayaan rumah tangga nasional. Sementara itu, grafik tersebut menggambarkan bahwa dalam jangka waktu yang sama, sekitar enam puluh persen dari seluruh kekayaan rumah tangga di seluruh negeri dimiliki oleh sepuluh persen penduduk lainnya. Seluruh aset keuangan (seperti saham dan surat berharga lainnya)

dan aset non-keuangan (seperti tempat tinggal) yang dimiliki rumah tangga Indonesia termasuk dalam definisi kekayaan rumah tangga nasional yang disajikan dalam laporan ini.

Posisi ibu kota harus berfungsi sebagai pusat daya tarik ekonomi yang berkelanjutan, yang berarti Ibukota Negara seharusnya memberikan dukungan yang mudah untuk pembangunan sektor sosial dan sektor ekonomi. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian terkait hubungan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi suatu ibukota dengan alasan-alasan tertentu. Sebagai contoh, di Belanda, Amsterdam dianggap sebagai Ibukota Negara menurut undang-undang, namun kantor pemerintahan pusat berada di Den Haag, tempat di mana juga terdapat perwakilan dari negara asing. Pada kasus yang sama, Malaysia memiliki Kuala Lumpur sebagai Ibukota Negara yang resmi, tetapi pusat pemerintahan, parlemen, dan perwakilan negara asing berada di kota tersebut, sedangkan kantor perdana menteri berkedudukan di Putrajaya. Dari pengalaman perpindahan Ibukota Negara di negara-negara lain, terlihat bahwa pemindahan tersebut melibatkan pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban Ibukota agar tidak terbebani oleh kedua fungsi tersebut, sehingga dapat meningkatkan dampak dari sektor ekonomi dan sektor pemerintahan. Pemindahan Ibukota biasanya mencakup perpindahan pusat pemerintahan ke lokasi lain, sementara pusat ekonomi, terutama sektor ekonomi seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga perusahaan lokal dan investor asing, diharapkan tetap berada di lokasi yang sudah mandiri dan memiliki infrastruktur yang mumpuni. Oleh karena itu, Jakarta diharapkan dapat tetap menjadi pusat perekonomian jika pemindahan Ibukota Negara sudah terlaksana.

Pemindahan Ibukota Negara ke wilayah luar Jawa dan Indonesia bagian timur (IBT) diharapkan dapat mengubah pusat pembangunan nasional dari Jawa dan Indonesia bagian barat (IBB) ke arah IBT. Langkah ini dianggap sebagai peluang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah di luar Jawa, memberikan kesempatan lebih besar bagi perkembangan daerah-daerah diluar jawa untuk berkembang. Pemindahan Ibukota Negara dianggap sebagai strategi yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dalam proses pembangunan fisik, ekonomi maupun sosial yang selama ini hanya berpusat di Jawa secara tidak merata dan tidak adil. Indonesia dianggap sangat memerlukan pembangunan infrastruktur dan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa untuk mengurangi potensi dominasi Jawa yang dinilai membuat ekonomi jangka panjang menjadi tidak efisien dan berkualitas rendah. Saat ini, 80 persen industri nasional terpusat di Jawa, sementara sebagian besar bahan untuk energi listrik dan industri tersebut harus diimpor dari luar Pulau Jawa.

Konsentrasi industri di Jawa juga dihubungkan dengan penyusutan lahan pertanian yang subur di pulau tersebut, dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (Tanggal 1 Juli 2010) menyatakan adanya penyusutan lahan pertanian di Jawa sebesar 27 juta hektar setiap tahun.

Ibu Kota, juga disebut sebagai ibu kota atau ibu kota politik, adalah kota metropolitan yang berfungsi sebagai pusat administratif suatu negara. Dari segi organisasi fisik, kantor administrasi pemerintahan seringkali berlokasi di ibu kota negara. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “pemimpin”, yang kemudian dikaitkan dengan kata modal, yang menunjukkan posisi suatu bangsa dalam pemerintahan. Sejarah pembentukan Ibu Kota Negara seringkali dikaitkan dengan konflik atau penyatuan banyak daerah. Ibu kota, yang berfungsi sebagai pusat perekonomian utama suatu wilayah dan sering kali berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, berfungsi sebagai pusat berbagai profesi, termasuk penelitian kebijakan publik, hukum, jurnalisme, dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, perpindahan ibu kota negara mungkin berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi negara tersebut.

Ibu kota Negara memiliki peran yang sangat signifikan, karena sering menjadi target utama dalam usaha penaklukan suatu negara. Penguasaan Ibukota Negara dianggap sebagai jaminan untuk menguasai sebagian besar atau bahkan seluruh wilayah negara, sehingga dapat mengurangi kekuatan lawan, terutama dalam konteks militer. Dalam sejarah pernah mencatat seperti di China, di mana pemerintahan yang terpusat di tingkat provinsi membuat runtuhnya Ibukota Negara dapat berakibat pada keruntuhan suatu dinasti atau kelompok penguasa. Oleh karena itu, Dinasti Ming memutuskan untuk memindahkan Ibukota Negara mereka dari Nanjing ke Beijing, dengan tujuan agar lebih mudah mengendalikan atau memantau kekuatan lawan maupun ancaman dari Mongol dan Manchu

Ada pandangan yang berbeda mengenai pentingnya fungsi Ibukota Negara sebagai target militer. Dengan mempertimbangkan sudut pandang ini, peran Ibu Kota Negara mungkin tidak sepenting sasaran militer. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan pemerintah pusat akan dipindahkan ke lokasi yang dianggap lebih aman dari ancaman serangan musuh atau bencana alam. Ketika tentara Inggris menginvasi beberapa kota di Amerika selama Perang Revolusi dan Perang tahun 1812, misalnya, tentara Amerika masih mampu berperang dari luar kota dengan bantuan pemerintah daerah dan masyarakat sipil di perbatasan. Hal ini terjadi meskipun tentara Inggris menyerang beberapa ibu kota Amerika. Hal serupa terlihat di Perancis, dimana birokrasinya terkoordinasi dengan efektif dan sangat terpusat, didukung oleh sumber daya yang sangat banyak yang membuat negara ini kuat di berbagai aspek. Namun, strategi militer

Perancis memiliki risiko tinggi jika Ibukota Negara mereka diduduki oleh musuh, seperti yang terjadi ketika Jerman berhasil menguasai Paris. Di Indonesia, saat Jakarta jatuh ke tangan tentara Belanda selama perang revolusi, pemerintah tetap dapat beroperasi dengan memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta dan kemudian ke Bukit Tinggi selama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan dapat terus berjalan dan mempertahankan kemerdekaan melalui perang gerilya, menunjukkan bahwa ibu kota negara bukanlah satu-satunya pusat kekuatan yang harus dipertahankan dalam konteks militer.

Banyak negara yang memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Misalnya saja Australia memindahkan ibu kotanya dari Sydney ke Canberra, sedangkan Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Studi kasus mengenai relokasi Brasilia, ibu kota negara Brasil, menempatkan kota ini di pusat negara, sekitar 934 kilometer dari Rio de Janeiro, bekas ibu kotanya. Proses pembangunan dimulai pada tahun 1957 dan resmi dicanangkan pada tahun 1960. Relokasi IKN Brazil dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Membangkitkan kebanggaan bangsa dengan membangun ibu kota kontemporer abad 21.
2. Integrasi dan pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi dan politik di jantung Brazil.
3. Membangun komunikasi antar wilayah dan memindahkan pusat pertumbuhan ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke wilayah tengah Brasilia.
4. Ibu kota lama di pantai Atlantik menampilkan konsentrasi sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan merupakan simbol kendali kolonial Portugis.

Dalam konsep perencanaan Ibukota Negara Brazil, beberapa aspek yang dipertimbangkan termasuk:

1. Brasilia, ibu kota negara, dipandang sebagai cermin kebebasan budaya Brasil, yang terlihat dari ciri-ciri arsitektur yang sesuai dengan keunikan kota tersebut.
2. Sesuai dengan sebutannya sebagai “ibu kota pesawat terbang”, Rencana Induk Brasilia berbentuk seperti pesawat terbang, menandakan pertumbuhan dunia penerbangan dibandingkan dengan penekanan sebelumnya pada transportasi laut.
3. Taman, ruang hijau, kebun binatang, kebun raya, dan fasilitas olahraga mencakup lebih dari 50% total luas Brasilia..

Saat ini, Brasilia memiliki jumlah penduduk sekitar 4.5 juta jiwa pada tahun 2019, dibandingkan dengan sekitar 136 ribu jiwa pada tahun 1960 saat pemindahan. Brazil juga mencatat PDB sekitar \$51.715.862 pada tahun 2015, dengan PDB per kapita sebesar \$15.506,38 pada tahun 2012. (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021, 2021).

Sebagai contoh lain dari negara yang berhasil memindahkan Ibukota Negaranya, Australia memindahkan Ibukota Negaranya dari Melbourne ke Canberra. Canberra terletak 472 km dari Melbourne, ibu kota sebelumnya. Proses pembangunan ibu kota baru ini berlangsung selama 69 tahun, mulai dari tahun 1920 hingga 1989. Pada tahun 1927, Parlemen Australia pindah ke Canberra, dan beberapa alasan serta motivasi di balik pemindahan ini melibatkan:

1. Penetapan Canberra sebagai ibu kota baru, pada akhirnya menyelesaikan perdebatan yang terjadi dalam memilih Melbourne atau Sydney sebagai ibu kota Australia.
2. Pemindahan Ibukota ke Canberra dilakukan untuk memperkuat identitas bangsa dan menanggapi isu politik yang ada di Ibukota Negara sebelumnya.

Australia memiliki konsep perencanaan yang matang dalam memindahkan Ibukotanya, mencakup:

1. Rencana dan desain ibu kota baru diperoleh melalui proses kompetisi internasional pada tahun 1911.
2. Prioritas diberikan pada kesesuaian lanskap, topografi, dan keindahan (*beautiful new city*) dalam pemilihan lokasi.
3. Gedung pemerintahan ditempatkan di sekitar danau buatan.
4. Kawasan pemukiman dirancang dengan luas area terbuka (1.716 km²).
5. Pembangunan *Australian National University* dijadikan sebagai magnet untuk mendorong pengembangan ekonomi di Australia.

Dalam pemindahan Ibukota Negara, diperlukan sistem pengelolaan yang baik, seperti yang diterapkan oleh Australia:

1. Komisi Pembangunan Ibu Kota Nasional (NCDC) dibentuk untuk mengawasi perencanaan, pembangunan, dan konstruksi; “Rencana Y” digunakan sebagai pedoman untuk mempercepat proses pembangunan.

2. Australian Capital Territory (ACT) didirikan pada tahun 1989 sebagai organisasi utama yang bertugas mengawasi Kota Canberra..

Saat ini, perkembangan jumlah penduduk Canberra mencapai sekitar 426.700 jiwa pada tahun 2019, dibandingkan dengan sekitar 5.915 jiwa pada tahun 1927 ketika pemindahan pertama kali dilakukan. Selain itu, Canberra memiliki PDB sekitar \$39.440.000 pada tahun 2018, dengan PDB per kapita mencapai \$94.831 pada tahun yang sama. (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021, 2021).

Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan antara kedua negara terutama untuk menyeimbangkan perannya sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus menurunkan kepadatan penduduk. Pemindahan IKN di Brazil, misalnya, menunjukkan bahwa Brasilia yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara baru mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, sedangkan Rio de Janeiro tidak mengalami dampak negatif. Namun, relokasi IKN dari Pulau Jawa bukannya tanpa bahaya, terutama jika menyangkut kapasitas infrastruktur daerah sasaran untuk mendukung operasional pemerintahan. Terkait pendanaan, meski pemerintah mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencakup 19,2% dari total anggaran sebesar Rp 446 triliun, namun kegagalan pembangunan sektor swasta dapat menambah beban APBN. . Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana dampak kebijakan relokasi IKN terhadap masyarakat dan perekonomian serta bagaimana mengantisipasi potensi bahaya dalam proses relokasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kebijakan Pemindahan Ibukota Negara mempengaruhi Aspek Sosial dan Ekonomi?
2. Bagaimana Urgensi dalam Penerapan Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui apa dampak Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara terhadap aspek sosial dan ekonomi
2. Untuk Mengetahui Urgensi dalam Penerapan Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dalam bidang akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas perkembangan bagi keilmuan dalam hal pembentukan kebijakan mengenai pemindahan Ibukota Negara dan aspek-aspek yang akan berpengaruh seperti aspek sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan juga bermanfaat untuk melihat bagaimana komunikasi antara Pemerintah, DPR, dan DPD dalam membahas kebijakan secara bersama-sama. Memberikan kontribusi dalam penelitian analisis dalam membentuk kebijakan Pemindahan Ibukota Negara (IKN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk melihat data tentang bagaimana kebijakan mengenai pemindahan Ibukota Negara dibuat, lalu untuk mengetahui hal yang sedang ramai dibicarakan mengenai Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dalam Perspektif Sosial Ekonomi.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual sangat penting dalam penelitian ini. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan dan panduan pada proses magang penelitian, namun juga memberikan batasan untuk memahami terminologi penelitian ini (Azwar, 2007). Definisi konseptual merupakan definisi yang sangat abstrak, meskipun masih berbentuk konsep dan maknanya masih dapat dipahami secara intuitif. Karena ini menjelaskan arah makalah kami, kami akan menggunakan beberapa definisi konsep yang digunakan untuk menemukan batasan yang lebih jelas untuk setiap konsep yang digunakan.

Gagasan adalah frasa yang terdiri dari satu kata atau lebih yang mendefinisikan suatu kejadian atau melambangkan gagasan tertentu. Persepsi (gambaran suatu ide) atau abstraksi yang dihasilkan dengan menyikapi unsur-unsur tertentu dalam suatu penelitian yang secara alamiah termasuk dalam konsep dasar untuk mengidentifikasi batasan-batasan yang berkaitan dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut (Hasan, 2018).

1. Konsep Kebijakan Publik

a. Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya adalah tindakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam proses menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara dan pembangunan bangsa yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, melaksanakan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu. Seorang pakar asal Jerman bernama Klinson, yang dikutip dalam (Ayuningtyas, 2014), menjelaskan bahwa karena politik merupakan sebuah konsep dan bukan fenomena yang spesifik atau konkrit, maka definisinya menghadapi banyak kendala, yaitu tidak mudah. Selain itu, Clinton mengidentifikasi bahwa kebijakan dapat lebih berguna jika dipandang sebagai arahan untuk bertindak, atau sebagai serangkaian pilihan dan keputusan yang saling terkait.

Thomas R. Dye, seperti yang dikutip oleh Islamy (Ii & Publik, 2009), mengartikan kebijakan publik sebagai "segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Definisi ini menyoroti fakta bahwa kebijakan publik lebih dari sekedar deklarasi tujuan pemerintah atau pegawai negeri; itu memerlukan pelaksanaan kegiatan tertentu. Lebih lanjut, karena mempunyai konsekuensi yang sama dengan memilih mengambil tindakan, maka keputusan pemerintah untuk tidak berbuat apa-apa juga dipandang sebagai kebijakan publik.

Menurut Anderson, sebagaimana dikutip oleh Islamy (Leo Agustino, 2003), unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan publik melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan atau terfokus pada suatu target tertentu.
2. Kebijakan mencakup tindakan atau pola tindakan yang diambil oleh pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan hasil dari apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekedar rencana atau niat untuk melakukannya.
4. Kebijakan publik dapat bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah terkait suatu masalah) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik selalu didasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat mengikat (otoritatif).

Pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dan merumuskan masalah menjadi tahap kritis dalam proses pembuatan

kebijakan. Menurut Dunn (1999) dalam bukunya "Analisis Kebijakan Publik," terdapat empat karakteristik utama dari masalah kebijakan, yaitu:

1. Terdapat keterkaitan antar permasalahan kebijakan. Masalah kebijakan di satu bidang dapat berdampak pada kebijakan di bidang lain. Ackoff, sebagaimana dinyatakan oleh Dunn, mencatat bahwa permasalahan kebijakan tidak berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari suatu sistem kesulitan yang dapat dianggap saling terkait, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara berbagai sektor.
2. Sifat subjektif dari kebijakan menyangkut hal ini. Faktor eksternal yang melahirkan kesulitan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dinilai secara selektif. Sekalipun ada anggapan bahwa suatu permasalahan bersifat obyektif, bukti yang sama mengenai suatu permasalahan dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara.
3. Kualitas artifisial dari isu-isu kebijakan. Kesulitan kebijakan muncul hanya ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk memperbaiki suatu kondisi tertentu. Permasalahan kebijakan merupakan hasil penilaian subjektif manusia; diterima sebagai pernyataan yang benar mengenai keadaan sosial yang obyektif; dan mungkin berkembang secara sosial.
4. Dinamika tantangan kebijakan. Ada berbagai solusi untuk suatu masalah, sama halnya dengan deskripsi masalah yang berbeda-beda. Permasalahan dan penyelesaiannya selalu berubah-ubah, oleh karena itu permasalahan tidak selalu mempunyai penyelesaian yang konsisten. Solusi terhadap suatu permasalahan dapat menjadi ketinggalan jaman, meskipun permasalahan itu sendiri tidak ada habisnya.

Di sisi lain, kebijakan menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Winarno (Leo Agustino, 2003), adalah serangkaian tindakan yang diikuti oleh pemerintah, organisasi, atau individu dalam situasi tertentu. Rangkaian tindakan untuk menangani peluang dan hambatan lingkungan yang harus diambil untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Lebih lanjut Effendi menyatakan dikutip Syafiie (2006) bahwa mengetahui sebab, akibat, dan efektivitas kebijakan dan program publik dapat menjelaskan gagasan kebijakan publik. Proses penyebaran informasi dan pengetahuan kepada lembaga eksekutif, anggota Kongres, lembaga yudikatif, dan masyarakat umum termasuk dalam pengertian ini. Data ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan membantu dalam perumusannya.

Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik mengacu pada tindakan-tindakan khusus yang diambil oleh pemerintah atau pejabat dalam menyelesaikan permasalahan publik yang mengandung konsep atau nilai yang sesuai dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat berdasarkan definisi dan pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya. Agar kebijakan publik dapat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat, maka setiap kebijakan pemerintah harus mempunyai tujuan. Karena peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan tindakan-tindakan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku bagi masyarakat, maka kebijakan publik memang perlu dijadikan suatu standar..

b. Ciri-Ciri Umum Kebijakan

Anderson dkk, seperti dikutip (Abidin, 2012) , mengemukakan ciri-ciri kebijakan, antara lain:

- a. Dalam pembuatan kebijakan, penting untuk memiliki orientasi pada tujuan. Kebijakan seharusnya tidak hanya dibuat secara kebetulan, melainkan harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam praktik politik dan birokrasi di berbagai negara, tujuan kebijakan memiliki arti yang signifikan, seringkali mencerminkan kebutuhan para pejabat untuk menunjukkan eksistensinya. Hal ini kadang-kadang menyebabkan perubahan kebijakan yang sering terjadi.
- b. Kebijakan tidak dapat berdiri sendiri; sebaliknya, ia terkait dengan berbagai kebijakan lain dalam masyarakat, serta berfokus pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum. Dalam satu bidang tertentu, kebijakan terhubung dengan kebijakan sebelumnya dan akan diikuti oleh kebijakan berikutnya, menciptakan suatu rangkaian hubungan. Jika hubungan antara kebijakan lama dan baru terputus, dapat mengakibatkan ketidakmampuan mencapai tujuan nasional yang diamanatkan oleh bangsa.
- c. Kebijakan merupakan tindakan nyata pemerintah, bukan sekadar keinginan atau kehendak yang belum diwujudkan. Pada dasarnya, kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk bertindak, baik dalam pelaksanaan maupun dalam menahan diri dari tindakan tertentu, dengan tujuan mencapai suatu sasaran.
- d. Kebijakan dapat memiliki sifat negatif, melarang, atau mengarahkan untuk melaksanakan atau mendukung sesuatu.

e. Kebijakan harus memiliki dasar hukum sehingga memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat yang harus mengikutinya. Tanpa adanya kekuasaan yang memaksa, suatu kebijakan tidak akan diakui sebagai kebijakan yang sah.

c. Unsur-Unsur Kebijakan

Menurut Abidin (Witarsa, 1981) dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan:

a. Tujuan kebijakan

Pembuatan kebijakan dilakukan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kehadiran tujuan menjadi landasan utama dalam menyusun tujuan dan kebijakan yang setidaknya memenuhi empat persyaratan. Yang pertama dan terpenting, tujuan kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pemangku kepentingan dan dapat diterima oleh mereka. Kedua, tujuannya harus logis, menunjukkan pilihan optimal di antara beberapa pilihan yang dievaluasi berdasarkan standar yang relevan dan adil. Organisasi, undang-undang yang relevan, dan sumber daya yang mereka miliki atau kendalikan seperti informasi, keuangan, logistik, sumber daya manusia, dan legitimasi semuanya berperan dalam menentukan tujuan suatu kebijakan. Ketiga, tujuan harus didefinisikan dengan baik, dengan mentalitas yang logis dan tindakan yang sederhana dan dapat dimengerti untuk mencapainya. Keempat, tujuan harus terfokus pada masa depan.

b. Masalah

Proses kebijakan dapat mengalami kegagalan jika penentuan masalah tidak tepat. Metode atau cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah menjadi tidak efektif jika pemecahan tersebut dilakukan terhadap masalah yang salah. Dalam penyelesaian masalah, penting untuk mengidentifikasi dengan tepat mana yang dianggap sebagai masalah dan mana yang bukan. Hal ini memerlukan kehati-hatian agar tidak terjebak pada pandangan bahwa gejala yang muncul merupakan masalah.

c. Tuntutan

Partisipasi masyarakat dapat berupa dorongan, permintaan, penolakan, dan kritik. Banyak faktor yang menimbulkan permintaan dari masyarakat. Pertama, hal ini mungkin disebabkan oleh pengabaian suatu kebijakan terhadap kepentingan suatu kelompok ketika kebijakan tersebut sedang dirumuskan, sehingga dapat merugikan dan menyebabkan kebijakan

tersebut tidak memenuhi kepentingan kelompok tersebut. Yang kedua adalah penciptaan kebutuhan baru yang mengikuti pencapaian suatu tujuan atau penyelesaian masalah.

d. Dampak

Dampak kebijakan muncul sebagai hasil dari pencapaian tujuan. Menilai besarnya dampak dari setiap kebijakan seringkali sulit karena beberapa faktor. Pertama, ketersediaan informasi yang kurang memadai, terkait dengan kurangnya data yang diperlukan. Kedua, dalam konteks sosial, pengaruh dari suatu kebijakan sulit dipisahkan dari pengaruh kebijakan lainnya. Ketiga, proses pengaruh dari kebijakan di bidang sosial sulit diamati karena perbedaan budaya di masyarakat.

e. Sarana atau alat kebijakan

Berbagai instrumen atau metode digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Metode kebijakan dapat berupa kewenangan, penghargaan, pengembangan kapasitas, tindakan simbolis, atau modifikasi terhadap kebijakan itu sendiri. (Witarsa, 1981). Penerapan program kebijakan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang berbasis partisipasi masyarakat. 53(9), 1689-1699, Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia.

f. Kriteria Kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan, terdapat serangkaian pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa tahapan. Setiap tahapan ini menggunakan kriteria yang berbeda, termasuk kriteria penyaringan isu, kriteria pemilihan strategi, kriteria evaluasi, dan kriteria rekomendasi.

1. Proses Penyaringan Isu

Tidak semua kepedulian sosial bisa dimasukkan ke dalam kebijakan. Permasalahan yang masuk dalam agenda kebijakan dipilih berdasarkan enam kriteria. Pertama, permasalahannya diperkirakan telah mencapai tahap kritis. Kedua, hal-hal yang sensitif dan berpotensi menarik perhatian publik dengan cepat. Ketiga, permasalahan yang unturnya spesifik, misalnya permasalahan SARA. Keempat, hal-hal yang melibatkan beberapa pihak agar mempunyai pengaruh yang luas. Kelima, pertanyaan tentang legitimasi dan otoritas. Keenam, hal-hal yang relevan dengan tren masyarakat yang sedang berkembang.

A. Pemilihan Strategi Kebijakan

Berbagai kriteria digunakan untuk memutuskan berbagai kemungkinan kebijakan. Yang pertama adalah efektivitas, yang mengukur apakah suatu tindakan kebijakan yang berbeda dapat memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedua adalah efisiensi, yang mengukur biaya yang terkait dengan pencapaian tujuan dan dihubungkan dengan pertimbangan ekonomi. Ketiga, kemampuan suatu kebijakan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan sudah memadai. Keempat, keadilan, yang mengukur bagaimana rencana kebijakan mendistribusikan hasil dan biaya ke berbagai kelompok masyarakat. Langkah kelima mencakup penyediaan jawaban yang mengukur seberapa baik suatu kebijakan dapat mengatasi permasalahan masyarakat atau tuntutan kelompok tertentu. Keenam, tepat sasaran, sebagai pemeriksaan terhadap penerapan kriteria tanpa mengabaikan unsur tertentu.

B. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan

Menurut jurnal yang berjudul "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik" (Ramdhani, 2017), pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi melalui beberapa dimensi. Pertama, konsistensi, yang menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan norma yang berlaku. Kedua, transparansi, yang berkaitan dengan akses terbuka terhadap informasi terkait pelaksanaan kebijakan. Ketiga, akuntabilitas, menuntut pertanggungjawaban administratif dan substantif setiap aktivitas kebijakan. Keempat, keadilan, mencakup pelayanan yang tidak bersifat diskriminatif. Kelima, partisipatif, mengacu pada keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Keenam, efektivitas, terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketujuh, efisiensi, melibatkan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumber daya.

2. Analisis Kebijakan

Menurut penelitian Dr. Suharno (Asmara, 2009), Budi Winarno menyampaikan analisis kebijakan dalam kaitannya dengan pemeriksaan dan penjelasan alasan dan dampak kebijakan publik. Menjelaskan asal usul, isi, dan dampak kebijakan tertentu serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut adalah tujuan utama analisis kebijakan. Analisis ini tidak memihak dan tidak menyiratkan dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Pemeriksaan kebijakan publik harus mempertimbangkan sejumlah faktor krusial.

Pertama-tama, tujuan utama analisis kebijakan adalah untuk menjelaskan kebijakan tersebut, bukan untuk menyarankan kebijakan lain yang sebaiknya diterapkan. Kedua, metode

ilmiah digunakan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap asal usul dan dampak kebijakan publik. Ketiga, pengembangan gagasan umum yang dapat dipercaya mengenai kebijakan publik dan metode pembentukannya merupakan tujuan dari penyelidikan ini. Hasilnya, ide-ide ini mempunyai relevansi di berbagai organisasi dan domain kebijakan. Dengan menggunakan metode ini, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan dengan isu-isu sosial dan politik kontemporer.

Suharno (2013) berpendapat bahwa analisis juga dapat dilihat sebagai upaya praktis dan intelektual dengan tujuan menghasilkan, memahami, dan menyebarkan pengetahuan mengenai proses pembuatan kebijakan. Lima langkah yang saling berhubungan membentuk proses analisis kebijakan, yang merupakan siklus pemikiran non-linier yang canggih. Fase-fase ini terjadi satu demi satu sepanjang waktu dan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan yang rumit, non-linier, dan pada dasarnya bersifat politis. Persiapan agenda, pengembangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penilaian kebijakan, dan implementasi kebijakan merupakan tahap kelima dari proses analisis proses kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye dalam Suharno (2013), analisis kebijakan, jika diterapkan pada bidang konvensional seperti ilmu politik, bersifat deskriptif dan berupaya memahami hubungan sebab akibat antara kebijakan publik. Selain itu, analisis kebijakan bersifat normatif, menurut Frank Fischer dalam Suharno (2013), dengan tujuan untuk menghasilkan dan menantang klaim pengetahuan atas cita-cita kebijakan publik di masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Suharno (2013) Lima kategori informasi yang dihasilkan oleh kebijakan publik: informasi mengenai isu-isu kebijakan, potensi kebijakan, tindakan yang diambil oleh kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Lima prosedur analisis kebijakan—perumusan masalah, perkiraan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi—digunakan untuk mengumpulkan data ini. Analisis kebijakan hanyalah permulaan dari proses penyempurnaan proses pembuatan kebijakan. Informasi yang penting bagi kebijakan pertama-tama harus dikumpulkan, diorganisasikan ke dalam makalah yang relevan dengan kebijakan, kemudian disebarluaskan melalui berbagai format presentasi. Ada beberapa tahapan yang terlibat dalam proses komunikasi kebijakan, termasuk analisis kebijakan, pembuatan konten, komunikasi interaktif, dan penggunaan pengetahuan.

Edi Suharto (2008) Analisis kebijakan dapat difokuskan ke berbagai arah, namun, umumnya tiga fokus utama dalam analisis kebijakan sosial mencakup:

1. Definisi masalah sosial, yang melibatkan perumusan atau pernyataan mengenai masalah sosial yang akan direspon atau ditanggulangi oleh kebijakan.
2. Implementasi kebijakan sosial, yang melibatkan pernyataan mengenai cara atau metode pelaksanaan kebijakan sosial tersebut. Implementasi kebijakan juga mencakup operasionalisasi alternatif kebijakan yang dipilih melalui berbagai program atau kegiatan.
3. Akibat-akibat kebijakan sosial, yang mencakup berbagai pertimbangan mengenai konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan sosial. Konsekuensi atau dampak ini dapat bersifat positif (manfaat) atau negatif (biaya). Akibat kebijakan dapat diprediksi sebelum implementasi kebijakan (model Analisis Kebijakan Publik retrospektif) atau sebelum dan setelah implementasi (model integratif).

2. Konsep Sosial Ekonomi

a. Konsep Sosial

Kata “sosial” dalam kosa kata besar bahasa Indonesia mengacu pada topik-topik yang berkaitan dengan masyarakat yang memerlukan hubungan interpersonal. Penjelasan ini memperjelas bahwa kata “sosial” mempunyai dua arti: pertama berkaitan dengan masyarakat, dan kedua berkaitan dengan kepentingan umum, seperti beramal dan mentalitas menolong. Kata Latin “socius” yang berarti bersama, bergabung, terikat, berasosiasi, atau berteman, merupakan asal mula istilah “sosial” muncul. Dalam bahasa Latin, “socio” juga berarti “berteman”. Dengan demikian, “sosial” dapat dipahami sebagai hubungan sosial atau persahabatan. Menurut Robert M. Z. Lawang, pengertian “sosial” adalah penafsiran pribadi yang memperhitungkan tindakan partisipan lain. Penafsiran yang diberikan oleh orang yang melakukan aktivitas itu sendiri disebut makna subjektif.

a. Robert M.Z. Lawang menyatakan bahwa sistem sosial terdiri dari sejumlah kegiatan atau elemen yang saling berhubungan, yang cenderung bersifat konstan.

b. Talcott Parsons menjelaskan bahwa suatu sistem membutuhkan empat persyaratan fungsional, yaitu adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pola pemeliharaan (L).

Adaptasi (A) merupakan kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pencapaian tujuan (G) adalah prasyarat fungsional yang menentukan tujuan serta

skala prioritas dari berbagai tujuan yang ada. Integrasi (I) mencakup kebutuhan sistem untuk menciptakan kesesuaian antar bagian dalam sistem. Pola pemeliharaan (L) adalah prasyarat yang diperlukan oleh sistem untuk memastikan kelangsungan tindakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

b. Konsep Ekonomi

Istilah Yunani oikos dan nomos adalah asal kata “ekonomi” pertama kali muncul. Nomos berarti organisasi, sedangkan oikos berarti rumah. Oleh karena itu, ekonomi dapat dianggap sebagai manajemen atau norma rumah tangga. Meskipun demikian, istilah “rumah tangga” dalam pengertian ekonomi tidak hanya mengacu pada keluarga; ini juga bisa merujuk pada perekonomian kota kecil, kota besar, dan bahkan seluruh negara. Salah satu bidang ilmu sosial yang berfokus pada manusia dan masyarakat adalah ekonomi.

Menurut Silk, ilmu ekonomi adalah studi tentang kekayaan dan merupakan bagian integral dari studi tentang manusia. Kehidupan sehari-hari dan sumber daya material yang diperoleh oleh manusia membentuk sifat ekonomi mereka. Dengan memahami konsep sosial dan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi mengacu pada posisi seseorang dalam masyarakat yang diatur secara sosial. Posisi ini tidak hanya memberikan hak dan kewajiban, tetapi juga mencerminkan kondisi dan kedudukan individu dalam lingkungan sosialnya.

Menurut M. Sastropradja, sosial ekonomi adalah kondisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekitarnya. Manaso Malo menambahkan bahwa sosial ekonomi melibatkan pemberian posisi yang diatur secara sosial, beserta hak dan kewajiban yang melekat pada si pemegang status tersebut. Granoveter, dalam pandangannya, menyatakan bahwa ekonomi selalu terkait dengan konteks sosial. Keterkaitan ini tidak hanya berlaku pada hubungan personal, tetapi juga mencakup kondisi sosial yang lebih luas dalam masyarakat interpersonal.

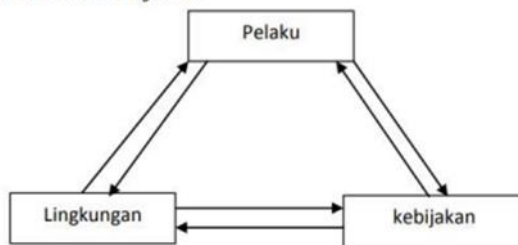
Burns dan DeVille menunjukkan bahwa ekonomi memiliki ketergantungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi suatu negara. Mereka menyatakan bahwa variasi dalam bentuk kapitalisme di berbagai negara disebabkan oleh keterkaitan sosial atau kontekstualisasi proses ekonomi. Polanyi mengemukakan bahwa aturan ekonomi sepanjang sejarah cenderung terkait erat dengan aturan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat setempat, terutama melalui transaksi ekonomi dan mekanisme harga.

F. Definisi Operasional

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu pilihan yang berupaya mencapai tujuan tertentu, melaksanakan tugas-tugas unik, atau memecahkan masalah tertentu. Pembentukan pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara bagian dan mendorong pembangunan nasional bertanggung jawab untuk menerapkan strategi ini. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (yaitu segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Selain itu, kebijakan dapat dianggap sebagai suatu sistem. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang terkait dan bergantung yang harus mengikuti pedoman khusus agar dapat berfungsi secara keseluruhan. Dunn (1994) menegaskan bahwa tiga komponen utama sistem kebijakan kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan kebijakan lingkungan memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Gambaran sistem kebijakan menggambarkan hubungan saling ketergantungan ini.

Tiga elemen sistem kebijakan



Gambar 1.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam
(Ayuningtyas, 2014:15)

Segitiga sistem kebijakan menggambarkan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi dan membentuk para pelaku kebijakan, dan bagaimana kebijakan lingkungan juga berdampak pada mereka semua. Komponen ketiga, aktor kebijakan, bersama dengan kebijakan publik dan kebijakan lingkungan hidup, memberikan kerangka kelembagaan yang dikenal sebagai sistem kebijakan yang membantu implementasi kebijakan publik. Sistem ini terdiri dari interaksi antara elemen kebijakan serta kepentingan teknologi dan sosiopolitik. William Dunn juga menawarkan analisis yang lebih mendalam mengenai sistem kebijakan publik dan bagian-bagian penyusunnya, sebagaimana dikemukakan dalam Ayuningtyas (2014:16).

a. Isi kebijakan (*policy content*)

Kebijakan merupakan puncak dari serangkaian pilihan yang dibuat oleh otoritas dan lembaga publik mengenai permasalahan yang menjadi perhatian publik, termasuk pilihan untuk tidak berbuat apa-apa. mencakup kebijakan yang mengatasi berbagai masalah publik yang berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan, pendidikan, energi, kesehatan, dan perlindungan.

b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan suatu kebijakan dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau terkena dampak kebijakan tersebut disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut, yang sering disebut sebagai pemangku kepentingan atau pelaku kebijakan. Para pelaku kebijakan ini dapat mencakup berbagai organisasi, termasuk partai politik, lembaga pemerintah, serikat pekerja, asosiasi jurnalis, dan sebagainya.

c. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan adalah konteks spesifik di mana suatu kebijakan dikembangkan, dimana lingkungan tersebut memiliki dampak pada kebijakan dan sekaligus dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

VARIABEL	3 KOMPONEN KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PUBLIK	1. Isi Kebijakan
	2. Aktor atau Pelaku Kepentingan Kebijakan
	3. Lingkungan Kebijakan

TABEL 1. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam (Ayuningtyas, 2014)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. (Sukmadinata, 2015) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”. Penelitian eksploratif menurut (Bungin, 2013) adalah “penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain sehingga walaupun dalam “kegelapan” peneliti eksplorasi tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut”. Penelitian ini menginvestigasi topik yang masih kurang diteliti sehingga sulit untuk meramalkan hasil yang akan ditemukan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan dalam konteks alamiah (Sugiyono, 2009). Sementara itu, menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif dimodifikasi sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002)

Penelitian penjelajahan atau eksploratif bertujuan untuk menemukan relasi-relasi baru yang terkait dengan suatu masalah yang luas dan kompleks. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data untuk dianalisis, dengan harapan dapat menghasilkan hipotesis. Karena kompleksitas data yang akan diselidiki, sulit untuk merumuskan hipotesis sebelumnya. Karena keterbatasan subjek dalam penelitian ini, pengambilan sampel atau responden dalam jumlah besar tidak memungkinkan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2018) Data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak langsung disediakan kepada peneliti, seperti melalui informasi yang diberikan oleh orang lain atau dokumen yang ada. (Fauzani & Dra. Nellyaningsih, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah yang mengacu kepada Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara, Dalam konteks penelitian, referensi atau literatur yang relevan dapat berupa buku, jurnal

ilmiah, dan artikel yang terkait dengan topik penelitian. mengenai Kebijakan Pemindahan Ibukota dalam Persepsi Sosial Ekonomi.

1) Analisis Konten

Penelitian ini menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai pendekatan penelitian. Menurut Barelson (Zuchdi, 1993) Analisis konten adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis dan objektif tentang isi yang terdapat dalam media komunikasi. Teknik ini juga diartikan sebagai suatu pendekatan sistematis untuk memahami makna pesan serta cara penyampaiannya. Meskipun pada awalnya dikembangkan dalam konteks ilmu komunikasi, namun seiring berjalannya waktu, teknik ini telah digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Tujuan dari analisis konten termasuklah: (Zuchdi, 1993):

- a. Memberikan gambaran mengenai arah atau tren yang ada dalam komunikasi atau pesan yang disampaikan.
- b. Menelusuri evolusi atau perubahan yang terjadi dalam pengetahuan dan penelitian ilmiah.
- c. Mengungkap adanya upaya propaganda atau penyebaran ideologi yang tersirat dalam pesan yang disampaikan.
- d. Mengenali tujuan dan karakteristik dari pengirim pesan atau penulis dalam komunikasi yang dilakukan.

Inti dari analisis konten adalah untuk mengidentifikasi isi dan tujuan dari suatu teks. Kajian deskriptif diperlukan untuk memahami isi teks, sementara untuk memahami maksudnya dilakukan dengan membuat inferensi dan tafsiran berdasarkan konstruk analisis yang telah dibangun. Konstruk analisis berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan analisis dan interpretasi teks agar dapat membuat inferensi yang akurat. Penting bagi peneliti untuk tetap berada dalam batas makna simbolis saat menganalisis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berupaya untuk menginterpretasikan dan memahami isi pesan serta gagasan utama yang terdapat dalam pemikiran H.A.R. Tilaar tentang nilai-nilai multikulturalisme.

2. Unit Analisis Data

Proses analisis data merupakan tahap utama dalam mengeksplorasi dan menjelaskan data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, model analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Beberapa ahli mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai berikut:

Bondan dan Bikle mendefinisikan analisis data kualitatif berikut: “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih – memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinsiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Dalam penelitian ini, akan diterapkan tahapan-tahapan berikut untuk menganalisis data:

- a. Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Reduksi data, yaitu proses seleksi data yang sesuai dengan kategori rumusan masalah penelitian. Langkah ini bertujuan untuk menyusun dan membersihkan data yang diperoleh berdasarkan kategori.
- c. Pengolahan data, meliputi identifikasi pola dalam bentuk narasi dengan deskripsi fenomena dan data yang telah terkumpul. Proses ini mencakup penemuan hubungan antara data dengan melakukan interpretasi rasional.
- d. Analisis data sebagai tahap penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada data dan informasi yang terkumpul, untuk mencapai hasil atau tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa narasi atau uraian teks. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen penting terkait dengan analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dari perspektif sosial ekonomi.

a. Data Sekunder

informasi yang dikumpulkan dari organisasi atau lembaga yang tidak mengutamakan kebutuhan lembaga tersebut dibandingkan pihak lain. Hal ini untuk memastikan bahwa data

sekunder yang diperoleh merupakan dokumen otentik dengan memperoleh landasan atau kerangka penelitian yang akan digunakan untuk menggambarkan temuan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2010) Yang dimaksud dengan metode analisis Tindakan mencari informasi dan mengumpulkannya secara metodis, terpisah dari temuan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, disebut pengumpulan data. Untuk membantu siswa lebih memahami diri mereka sendiri dan orang lain, pengetahuan dapat dikategorikan, dibagi menjadi unit-unit, disintesis, diorganisasikan berdasarkan pola, dan kesimpulan yang bijaksana dapat dipilih dari penelitian.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Dengan menggunakan pendekatan ini, kesimpulan ditarik berdasarkan fakta-fakta konkret yang ditemukan dalam data, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan kesimpulan umum. Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan dokumen-dokumen secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil pembahasan mengenai Pemindahan Ibukota Negara. Seperti Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Pembangunan Nasional, Draft Raperpres RTR KSN IKN, Rancangan Peraturan Presiden Perincian Rencana Induk Ibukota Negara, Rancangan Peraturan Presiden Otorita Ibukota Negara, Draft RPP Kewenangan Otorita Ibukota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Buku Saku IKN Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional, Jurnal terkait IKN, maupun berita online.

b. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2010) Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi yang relevan, dan memusatkan perhatian pada komponen-komponen yang relevan dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan tema-tema yang relevan dengan topik kajian dan menyampaikan materi secara lebih terkonsentrasi dan sukses. Peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih baik, mempermudah pengumpulan data lebih banyak, dan mempermudah

menemukan informasi yang mereka perlukan nantinya dengan menggunakan teknik reduksi data.

c. Eksploratif

Menurut (Sugiyono, 2017) Penelitian deskriptif eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mendalam tentang suatu fenomena atau hasil penelitian tertentu. Namun, deskripsi yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi.

